

# **ANALISIS GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA BERDASARKAN DATA PROVINSI TAHUN 2024 DENGAN METODE BUSINESS INTELLIGENCE**

**Crisna Reza Prasetya<sup>1</sup>, Ryan Alvaro<sup>2</sup>, Muhammad Ihsan Ashari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang,  
Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

\*E-mail: 9.acrisnareza@gmail.com<sup>1</sup>, ryanalvaro251@gmail.com<sup>2</sup>,  
dosen03154@unpam.ac.id<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

**ANALISIS GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA BERDASARKAN DATA PROVINSI TAHUN 2024 DENGAN METODE BUSINESS INTELLIGENCE.** Garis kemiskinan merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta menentukan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin menghitung garis kemiskinan setiap periode Maret dan September untuk memantau dinamika kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan tren garis kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2024 menggunakan pendekatan Business Intelligence (BI). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder BPS tahun 2024. Data dianalisis dan divisualisasikan melalui grafik batang, grafik garis, dan perbandingan antar periode untuk mengidentifikasi pola perubahan garis kemiskinan serta keterkaitannya dengan jumlah penduduk miskin dan harga komoditas pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh provinsi mengalami kenaikan garis kemiskinan dari Maret ke September 2024, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi dan Gorontalo terendah. Meskipun demikian, sebagian besar provinsi mengalami penurunan persentase penduduk miskin, yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data..

**Kata kunci:** Garis Kemiskinan, Business Intelligence, Kemiskinan, BPS, Analisis Provinsi.

## **ABSTRACT**

**POVERTY LINE ANALYSIS IN INDONESIA BASED ON PROVINCIAL DATA IN 2024 USING THE BUSINESS INTELLIGENCE METHOD.** The poverty line is a key indicator used to measure community welfare and determine the number of poor people in Indonesia. Statistics Indonesia (BPS) calculates the poverty line twice a year, in March and September, to monitor economic conditions. This study aims to analyze provincial poverty line trends in Indonesia in 2024 using a Business Intelligence (BI) approach. A quantitative descriptive method was applied using secondary data from BPS. Data were analyzed and visualized through bar charts, line graphs, and inter-period comparisons to identify changes in poverty lines, the number of poor populations, and food commodity prices. The results show that all provinces experienced an increase in the poverty line from March to September 2024, with DKI Jakarta recording the highest poverty line and Gorontalo the lowest. However, most provinces showed a decline in the percentage of poor population, indicating an improvement in purchasing power despite rising living costs. These findings provide valuable insights for data-driven poverty alleviation policies..

**Keywords:** MSEs, labor costs, Business Intelligence, Statistics Indonesia (BPS), provincial analysis.

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi antarwilayah [1]. Tingkat kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak [2]. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan menjadi aspek krusial dalam evaluasi kebijakan pembangunan nasional.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan [3]. Konsep ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam menentukan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia secara periodik.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menghitung garis kemiskinan dua kali dalam setahun, yaitu pada periode Maret dan September, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) [4]. Perubahan nilai garis kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain inflasi, fluktuasi harga kebutuhan pokok, kondisi pasar tenaga kerja, serta daya beli masyarakat di masing-masing wilayah [5].

Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar provinsi menyebabkan adanya variasi garis kemiskinan yang cukup signifikan di Indonesia. Provinsi dengan tingkat urbanisasi dan biaya hidup yang tinggi cenderung memiliki garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan daerah lain [6]. Oleh sebab itu, analisis garis kemiskinan berbasis provinsi menjadi penting untuk memahami ketimpangan biaya hidup dan daya beli masyarakat antarwilayah.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan analisis data, pendekatan Business Intelligence (BI) semakin banyak digunakan dalam analisis data sosial ekonomi. BI memungkinkan pengolahan, visualisasi, dan interpretasi data secara lebih sistematis dan komprehensif [7]. Penelitian ini menggunakan pendekatan BI untuk menganalisis garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan data provinsi tahun 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sebagai dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan [5], [9]. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengukuran kemiskinan umumnya dilakukan melalui pendekatan absolut dan relatif. Pendekatan kemiskinan absolut mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan relatif membandingkan kondisi ekonomi individu terhadap standar hidup rata-rata masyarakat [5]. Indonesia menggunakan pendekatan kemiskinan absolut dalam penghitungan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan minimum masyarakat. Menurut BPS, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan [8]. Garis kemiskinan makanan didasarkan pada kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

BPS secara rutin menghitung garis kemiskinan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September, menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) [4]. Perbedaan waktu penghitungan ini bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan harga dan pola konsumsi masyarakat sepanjang tahun.

Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan non-struktural, seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok [9]. Kenaikan harga pangan, khususnya beras dan komoditas strategis lainnya, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan garis kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah [10].

Inflasi merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan garis kemiskinan karena menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok [10]. Inflasi pangan memiliki dampak yang lebih besar terhadap rumah tangga miskin karena proporsi pengeluaran untuk pangan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan menengah dan atas [9].

Selain inflasi, tingkat upah dan kesempatan kerja juga memengaruhi kemampuan rumah

tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Peningkatan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan [5], [11].

Indonesia memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang sangat beragam antar wilayah. Perbedaan tingkat urbanisasi, struktur ekonomi, dan biaya hidup menyebabkan adanya variasi garis kemiskinan antar provinsi [6]. Provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi dan dominasi sektor jasa cenderung memiliki biaya hidup yang lebih mahal, sementara daerah dengan basis ekonomi agraris umumnya memiliki biaya hidup yang lebih rendah [11].

Ketimpangan wilayah ini menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan karena pendekatan yang bersifat seragam sering kali kurang efektif. Oleh karena itu, analisis kemiskinan berbasis wilayah menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran [6], [9].

Perbedaan garis kemiskinan antar provinsi mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi wilayah. Provinsi dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi dan biaya hidup mahal cenderung memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi, meskipun persentase penduduk miskinnya tidak selalu lebih besar [11]. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga struktur harga dan pola konsumsi masyarakat.

Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin merupakan dua indikator yang saling berkaitan namun tidak selalu bergerak searah. Kenaikan garis kemiskinan tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin apabila pendapatan masyarakat juga meningkat [5]. Sebaliknya, stagnasi pendapatan di tengah kenaikan garis kemiskinan dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat memitigasi dampak kenaikan garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk miskin [9]. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal dan sosial dalam menjaga daya beli kelompok rentan.

Harga pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin. Komoditas seperti beras, cabai, dan telur ayam merupakan komponen utama dalam pengeluaran rumah tangga, sehingga fluktuasi harganya berdampak langsung terhadap garis kemiskinan [1], [2].

Ravallion [10] menyatakan bahwa kenaikan harga pangan cenderung memperburuk kondisi

kemiskinan dalam jangka pendek, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, stabilisasi harga pangan menjadi salah satu instrumen kebijakan penting dalam pengendalian kemiskinan.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memiliki hubungan erat dengan perubahan tingkat kemiskinan. Kenaikan inflasi, khususnya inflasi bahan pangan, secara langsung meningkatkan harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi rumah tangga miskin, sehingga mendorong kenaikan garis kemiskinan [10]. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap kemiskinan cenderung lebih besar di negara berkembang dibandingkan negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya [5], [9]. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas tingkat kemiskinan.

Tingkat upah dan kondisi pasar tenaga kerja memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upah minimum regional berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga pekerja berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan menurunkan tingkat kemiskinan [5], [11]. Namun, peningkatan upah juga dapat berdampak pada biaya produksi dan harga barang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Penelitian Suryahadi et al. [9] menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memitigasi dampak kenaikan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Pemerintah menggunakan indikator ini sebagai dasar dalam menentukan sasaran program bantuan sosial, subsidi, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya [6], [15]. Ketepatan pengukuran garis kemiskinan menjadi krusial agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.

World Bank [6] menekankan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif harus berbasis data yang akurat dan memperhatikan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, analisis garis kemiskinan berbasis provinsi dapat memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Ketidakstabilan pasokan dan harga pangan dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi [10]. Kenaikan harga pangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan garis kemiskinan dan memperbesar risiko kemiskinan baru.

Menurut BPS, komoditas pangan menyumbang proporsi terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan makanan [1], [2]. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan menjadi elemen penting dalam pengendalian kemiskinan, khususnya di daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap pangan pokok.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Business Intelligence (BI) semakin berkembang dalam sektor publik. BI memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengolah data dalam jumlah besar dan menyajikannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami [12]. Pendekatan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Falefi dan Waryanto [14] menyatakan bahwa penerapan BI dalam analisis data sosial ekonomi dapat meningkatkan efektivitas evaluasi kebijakan karena mampu menampilkan tren dan pola secara komprehensif. Senduk et al. [13] juga menegaskan bahwa visualisasi data berbasis BI membantu pengambil kebijakan dalam memahami perbedaan kondisi antar wilayah secara lebih cepat dan akurat.

Business Intelligence (BI) merupakan pendekatan analisis data yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, pengolahan data, visualisasi, serta penyajian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data [12]. Dalam konteks analisis kemiskinan, BI berperan penting dalam mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah secara lebih efektif dan informatif.

Dalam analisis sosial ekonomi, BI banyak digunakan untuk memetakan kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan indikator pembangunan lainnya. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam mengidentifikasi pola, tren, dan anomali data yang sulit dideteksi melalui metode konvensional [13], [14].

Penerapan BI dalam analisis data kemiskinan telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya karena mampu menyajikan data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan [13]. Oleh karena itu, penggunaan BI dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis serta

relevansi hasil penelitian terhadap kebijakan publik.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan data statistik dan visualisasi dapat meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kemiskinan. Senduk et al. [13] menunjukkan bahwa visualisasi data berbasis BI mampu memperjelas perbedaan garis kemiskinan antar wilayah di Indonesia. Falefi dan Waryanto [14] juga menekankan bahwa BI dapat meningkatkan kualitas analisis data sosial ekonomi dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis statistik deskriptif tanpa mengintegrasikan visualisasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menerapkan pendekatan Business Intelligence dalam analisis garis kemiskinan berbasis provinsi.

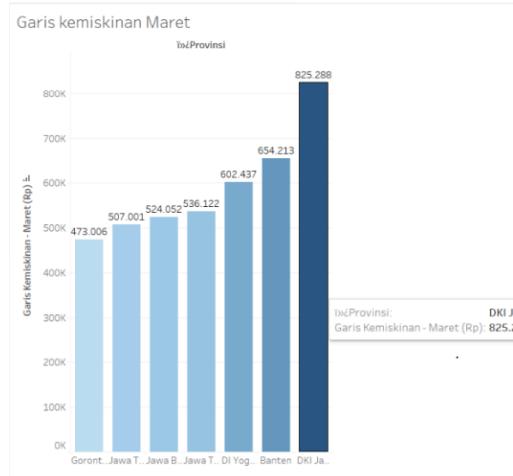
### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Business Intelligence (BI). Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi data secara objektif melalui analisis numerik dan visualisasi, sehingga sesuai untuk menganalisis garis kemiskinan antar provinsi di Indonesia [14].

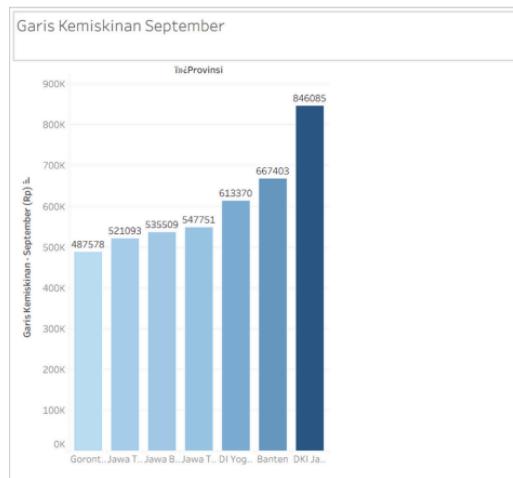
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Data tersebut meliputi garis kemiskinan periode Maret dan September, jumlah penduduk miskin per provinsi, serta data pendukung berupa harga komoditas pangan utama [15]. Penggunaan data BPS dipilih karena memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam penelitian sosial ekonomi.

Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, pembersihan data (data cleaning), pengelompokan data berdasarkan provinsi dan periode waktu, serta analisis deskriptif. Data kemudian diolah menggunakan pendekatan Business Intelligence untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan garis kemiskinan antar wilayah [16].

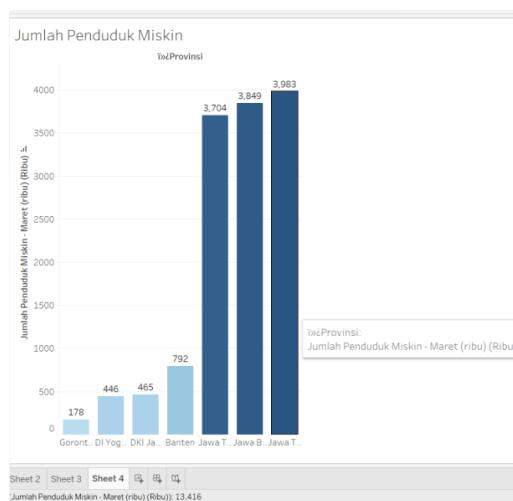
Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk visualisasi untuk mempermudah interpretasi. Visualisasi yang digunakan antara lain grafik batang, grafik garis, dan grafik perbandingan antar periode. Adapun label visualisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



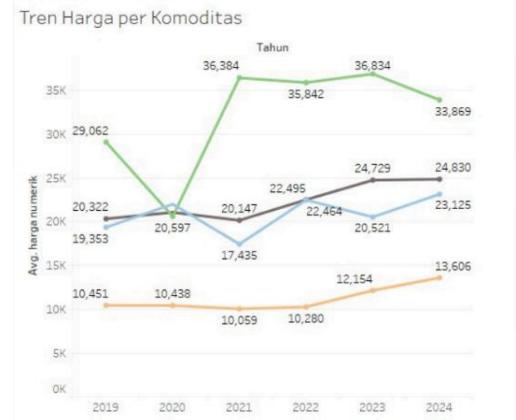
Gambar 1. Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi di Indonesia Periode Maret 2024



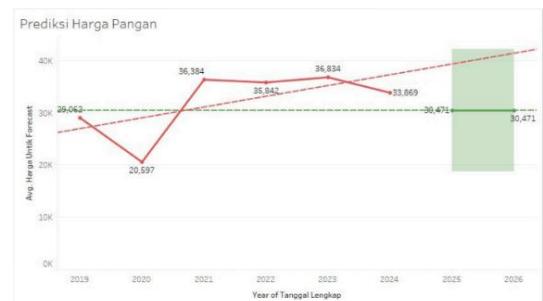
Gambar 2. Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi di Indonesia Periode September 2024



Gambar 3. Tren Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2024 per Provinsi



Gambar 4. Perbandingan Kenaikan Harga Komoditas Pangan Per Tahun



Gambar 5. Tren Kenaikan Harga Komoditas Pangan Cabai Per Tahun

Seluruh visualisasi tersebut digunakan sebagai alat bantu analisis untuk memperjelas perbedaan dan dinamika garis kemiskinan antar provinsi di Indonesia.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan garis kemiskinan dari periode Maret ke September. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup minimum yang harus dipenuhi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena tersebut terjadi secara nasional, meskipun dengan besaran yang berbeda antar provinsi, yang mengindikasikan adanya variasi struktur ekonomi dan harga kebutuhan pokok di masing-masing wilayah.

Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki garis kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi serta biaya hidup yang relatif mahal, terutama untuk kebutuhan perumahan, transportasi, dan jasa. Sebaliknya, Provinsi

Gorontalo menunjukkan nilai garis kemiskinan terendah, yang mencerminkan biaya hidup yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Perbedaan ini menegaskan bahwa garis kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh struktur harga dan pola konsumsi masyarakat.

Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di beberapa wilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, penyesuaian upah minimum, serta efektivitas program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa harga komoditas pangan memiliki peran signifikan dalam mendorong kenaikan garis kemiskinan. Komoditas seperti beras, cabai, dan telur ayam mengalami kenaikan harga selama tahun 2024, yang berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga miskin dan hampir miskin. Kenaikan harga pangan memberikan tekanan yang lebih besar bagi kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran untuk pangan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan menengah dan atas.

Pendekatan Business Intelligence (BI) yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menyajikan data secara visual dan komparatif. Melalui visualisasi grafik, perbedaan nilai garis kemiskinan antar provinsi serta tren kenaikannya dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini mendukung pendapat bahwa BI dapat menjadi alat analisis yang penting dalam kajian sosial ekonomi, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi makro, harga pangan, serta karakteristik wilayah. Analisis berbasis BI memberikan nilai tambah dalam memahami kompleksitas tersebut, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan di seluruh provinsi. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi yang berdampak langsung terhadap biaya hidup minimum masyarakat. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya pengeluaran yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan.

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan nilai garis kemiskinan antar provinsi yang cukup signifikan. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi, yang mencerminkan tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, Provinsi Gorontalo memiliki nilai garis kemiskinan terendah, yang mengindikasikan biaya hidup yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Perbedaan ini menegaskan bahwa garis kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh struktur harga dan karakteristik ekonomi wilayah.

Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, penyesuaian upah, serta efektivitas program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Pendekatan Business Intelligence yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menganalisis dan menyajikan data kemiskinan secara sistematis dan informatif. Pemanfaatan visualisasi data memungkinkan identifikasi pola, tren, dan perbedaan kondisi kemiskinan antar provinsi secara lebih jelas, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dalam perumusan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi wilayah, dan berbasis data. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akade-

mik serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan data dan periode waktu yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan Indonesia Maret 2024," BPS, Jakarta, 2024.
- [2]. Badan Pusat Statistik, "Garis Kemiskinan Indonesia September 2024," BPS, Jakarta, 2024.
- [3]. Badan Pusat Statistik, "Konsep dan Metodologi Pengukuran Kemiskinan," BPS, Jakarta, 2023.
- [4]. Badan Pusat Statistik, "Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024," BPS, Jakarta, 2024.
- [5]. M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development*, 13th ed., New York: Pearson Education, 2020.
- [6]. World Bank, "Poverty and Equity Brief: Indonesia," World Bank Group, Washington DC, 2022.
- [7]. M. Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.
- [8]. L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2019.
- [9]. A. Suryahadi, G. Hadiwidjaja, and S. Sumarto, "Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 48, no. 2, pp. 209–227, 2012.
- [10]. M. Ravallion, *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*, New York: Oxford Univ. Press, 2016.
- [11]. D. S. Pratomo and P. M. A. Saputra, "Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," *J. Ekon. Pembangunan*, vol. 12, no. 2, pp. 115–130, 2011.
- [12]. E. Turban, R. Sharda, and D. Delen, *Business Intelligence, Analytics, and Data Science*, Boston: Pearson, 2018.
- [13]. F. K. Senduk, R. Waluyo, and K. N. Isnaini, "Data Analysis Using Business Intelligence for Visualizing Indonesia's Poverty Line," *Sistemasi*, vol. 14, no. 3, pp. 1122–1134, 2025.
- [14]. M. R. Falefi and B. D. Waryanto, "Analisis Data Sosial Ekonomi Menggunakan Business Intelligence," *J. Sist. Inf.*, vol. 16, no. 1, pp. 45–55, 2020.
- [15]. United Nations Development Programme, "Human Development Report: Indonesia," UNDP, New York, 2023.